

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. (<http://www.bantul.go.id>)

Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul.

Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu **Bantulkarang** untuk kawasan selatan, **Denggung** untuk kawasan utara, dan **Kalasan** untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal **20 Juli 1831** atau **Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759** (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan **Kabupaten Bantul** yang sebelumnya di kenal bernama **Bantulkarang**. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama **Raden Tumenggung Mangun Negoro** kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai **Hari Jadi Kabupaten Bantul**. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada **Usamu Seirei** nomor 13 sedangkan **stadsgemente ordonantie** dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999-2004. Pada Tahun 2005, Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan periode selanjutnya yaitu tahun 2010-2015. Tahun 2015, pada pilkada serentak Hj. Sri Surya Widati mencalonkan lagi namun dikalahkan oleh **Drs. H. Suharsono yang** dilantik sebagai Bupati Bantul periode 2016 - 2021 pada Rabu, 17 Februari 2016. (<http://www.bantul.go.id>).

2. Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 955.051 Jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut:

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasihan	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
	Jumlah	475.872	479.143	955.015
	Presentase	49,83	50,17	100

Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 18 Januari 2017, Jam 13:45 WIB
(Proyeksi Penduduk 2010-2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD, sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3,D4-S3, sebagai berikut ini :

Tabel 2.2
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1.	Tidak punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15
5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

Sumber : *www.bantul.go.id Diakses Tanggal 18 Januari 2017, Jam 14:23 WIB*

3. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.3

Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 17 Januari 2017, Jam 14:23 WIB

Untuk jumlah perangkat daerah Kabupaten Bantul atau SKPD yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 7 kantor, 6 Badan, dan 1 Inspektorat dan 16 Dinas dan 5 BUMD. Adapun nama-nama dari SKPD tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.4**SKPD Kabupaten Bantul**

Dinas	Kantor	Badan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan	Kantor Pengolahan Data Telamatika	Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kantor Perpustakaan Umum	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Dinas Pertanian dan Kehutanan	Kantor Arsip Daerah	Inspektorat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kantor Pengelolaan Pasar	Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pekerjaan Umum	Kantor Pemuda dan Olah Raga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sumber Daya Air		
Dinas Kependudukan Sipil		
Dinas Perhubungan		
Dinas Perijinan		
Dinas Sosial		
Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal		
Dinas Pendidikan Dasar		
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat		

Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 17 Januari 2017, Jam 14:23 WIB.

B. Deskripsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah "Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKD Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.

Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.

www.bantul.go.id

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

Adapun tugas pokok dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumus kebijakan teknis bidang Kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Bantul

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, 4 Bidang dengan beberapa Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Empat bidang tersebut terdiri dari Bidang Pengadaan dan Pengembangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Mutasi dan Kepangkatan dan Bidang Administrasi dan Kesejahteraan (www.bantul.go.id).

5. Diskripsi aplikasi Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Guru

BKD Kabupaten Bantul

a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aspek relasi data kepegawaian secara terintergrasi dan tersentralisasi, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi optimalisasi e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul mencoba melakukan pendekatan baru dengan menggunakan teknologi informasi untuk mentransformasikan hubungan antara BKD dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Salah satunya dibangun melalui Sistem Aplikasi Terpadu BKD Kabupaten Bantul (BKD Bantul

Apps). Pada intinya, BKD Kabupaten Bantul ingin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan mengoptimalkan penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian.

b. Tujuan

Tujuan khusus (bagi internal BKD) dibangunnya sistem aplikasi ini adalah membuat mesin pengelolaan data yang *interrelationship* dalam proses kepegawaian sehingga mampu menyajikan potret kondisi kepegawaian yang lebih akurat lagi. Adapun tujuan secara umum adalah meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan yang diberikan oleh BKD Kabupaten Bantul.

c. Spesifikasi Komponen Penetapan Angka Kredit (PAK)

1. Nama : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul (BKD Bantul Apps) Komponen : Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
2. Pemrograman dan *database* sesuai dengan *core* (induk) BKD Bantul Apps.
3. Fungsi : Menangani proses Penilaian Kinerja Guru (penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya)

bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. *Business process* komponen sistem berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru maka harus terintegrasi dan sinkron dengan Komponen Penilaian Angka Kredit (PAK).
6. Pengguna : Guru, Tim Penilai, Tim Verifikator BKD.
7. *Output* : PK Guru tercetak/*print out* dan dalam Portable Document Format (.pdf)
8. Hasil pengolahan data dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain yang membutuhkan.